

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dasar pemikiran peneliti, melihat dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pengawasan pajak reklame. Pada bagian ini peneliti menarik berbagai hasil penelitian terdahulu yang diringkas pemaparannya untuk dibuat bahan komparasi dan acuan dengan penelitian yang hendak dilakukan juga untuk mencegah dugaan keserupaan dengan penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu yang diambil yaitu :

- 1. Riska Widia Yanti. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.**

Pokok permasalahan penelitiannya dinyatakan pendapatan pajak reklame belum optimal, disebabkan rendahnya pelaksanaan, dan pengawasan pajak secara langsung sehingga dapat mengakibatkan tidak tercapainya target dalam pajak reklame. Teori dipakai oleh penelitiannya melihat kepada variabel yang diteliti karena penelitiannya memakai kuantitatif, (XI) Pelaksanaan Kegiatan. (X2) Pengawasan. Dengan melakukan penilaian, tindakan kooperatif dari kegiatan yang salah dengan sasaran yang dituju. (Eka Marta Diana (2015), (Y) Penerimaan Pendapatan pajak. Dilihat dari realisasi dari target yang ditetapkan maka diharapkan pengelolaannya bisa dilaksanakan secara efektif oleh dinas perpajakan daerah

kecamatan kampar, sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran dalam pemungutan dapat dihindari. (Bambang Rianto,2011).

Penggunaan cara penelitiannya memakai kuantitatif, dan metode analisis analisis statistik menggunakan SPSS. Data sekunder dari penelitiannya dengan pengambilan data target dan reliabilitas pajak reklame ditempat penelitiannya langsung. Data primer dari penelitian ini adalah berberntuk koesioner. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial variabel pelaksanaan pemungutan pajak reklame, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak reklame di Kabupaten Kampar.

2. Arief Sanderson. 2018. Analisis Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini belum memilikinya pedoman kebijakan dan prosedur pengawasan, dan kurangnya sistem pengawasan yang dilakukan. Bagian dari tujuan penelitiannya menganalisis sistem pengawasan penerimaan pajak reklame dikota Medan. Teori yang digunakan merujuk ke sistem pengendalian internal diantaranya yaitu kegiatan pengendalian, penilaian resiko, dan lingkungan pengendalian. dan Penggunaan metode penelitiannya bersifat deskriptif dengan jenis data kuantitatif, Berdasarkan hasil penelitiannya ternyata sistem pengawasannya belum efektif karena karena tidak adanya pedoman kebijakan prosedur yang jelas untuk dilakukannya pengawasan pajak reklame. Serta pengawasannya sering tidak dilakukan dengan optimal dalam hal pelaksanaan, permasalahan yang sering berulang setiap periodenya belum di

evaluasi dengan baik. Adanya berbagai macam kendala dalam pengawasan tersebut memberikan efek penurunan terhadap penerimaan pajak reklame.

3. Herdy Anizar. 2013. Efektifitas Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi gejala dalam penelitian ini adalah dimana Kota Pekanbaru sebagai kota yang terus berkembang dan sebagai Ibu kota Provinsi, tentunya masih banyak yang perlu ditata dan dibenahi termasuk dalam pemasangan reklame terhadap suatu produk, baik dengan menggunakan papan, kain, dan bentuk lainnya yang memerlukan pengaturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan terhadap pemasangan reklame, hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemasangan reklame dan Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Teori yang digunakan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru. Metode penelitiannya termasuk penelitian hukum empiris, pengumpulan datanya dari hasil wawancara dan angket yang disebarakan.

Berdasarkan hasil penelitiannya ternyata, pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame dilakukan oleh tim pengawas yang ditunjuk oleh pejabat yang terkait (Dispenda Kota Pekanbaru). Apabila pemasangan reklame tersebut tidak pada tempat yang ditentukan, maka akan dilakukan pembongkaran, termasuk pemasangan reklame yang tidak didaftarkan atau tidak mengajukan permohonan izin, maka dilakukan penertiban berupa pembongkaran. Namun dari segi efektivitas pengawasan belum dapat dikatakan efektif karena masih ada

pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya. Hambatan dalam pengawasan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru adalah melakukan penataan di lapangan, yang setiap saat harus diawasi. Sedangkan petugas pengawas jumlahnya masih sedikit, sehingga menyulitkan dalam melakukan pemantauan di lapangan. Di samping tempat atau fasilitas tempat pemasangan reklame masih terbatas, sehingga semua penyelenggara berlomba-lomba dalam melakukan pemasangan reklame. Kemudian tempat atau lokasi dari pihak penyelenggara tidak dapat dipastikan sesuai dengan porsinya.

4. Agustian Lukman Hakim.2013. Efektivitas Pengawasan Pajak Reklame Di Kota Tangerang.

Pokok permasalahan penelitiannya yaitu rendahnya sosialisasi yang dilakukan tentang pemahaman penyelenggaraan reklame, kurangnya fasilitas yang menunjang untuk melakukan pengawasan. Bagian dari tujuan penelitiannya meneliti pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame di Kota Tangerang. Untuk teori yang dipakainya sama seperti teori yang dipakai peneliti. Penggunaan metode penelitiannya memakai kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan Studi dokumentasi. Sedangkan penelitiannya penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dan pengumpulan datanya ada perbedaan, hanya saja penulis ditambahkan dengan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitiannya ternyata pengawasan pemungutan pajak reklame belum terlaksana dengan baik.

Tabel 1.1

Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Riska Widia Yanti (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang pengawasan pajak reklame 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus Penelitian di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar • Teori yang dipakainya berbeda • Metode Penelitiannya berbeda dengan menggunakan kuantitatif
2.	Arief Sanderson. 2018	Analisis Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang pengawasan pajak reklame. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian berbeda • Teori yang digunakan berbeda • Metode yang dipakainya kuantitatif.
3.	Herdy Anizar. 2013.	Efektifitas Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang pengawasan pajak reklame. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian berbeda • Teori yang dipakainya berbeda

		Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru.		<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitiannya berbeda
4.	Agustian Lukman Hakim. 2013	Efektivitas Pengawasan Pajak Reklame Di Kota Tangerang.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan penelitiannya sama menggunakan kualitatif. • Teori yang dipakainya sama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian berbeda • Waktu penelitiannya berbeda

Dari empat rujukan penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan teori pengawasan. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam beberapa hal seperti lokasi penelitian dan waktu penelitian. Dalam penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan proses pengawasan dalam penerimaan pajak reklame, hambatan pengawasan, dan upaya mengatasi hambatan pengawasan dalam penerimaan pajak reklame oleh BPPD Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta jenis penelitiannya deskriptif, dan datanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumen dan juga triangulasi.

B. Kajian Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti administrasi merupakan suatu rangkaian dan aktivitas dengan ditetapkannya tujuan serta ditetapkannya cara

pembinaan organisasinya. Menurut Thoha dalam Banga (2018:14) bahwa kata administrasi asalnya dari kata Latin : yaitu *administrare*. *Ad* sendiri berarti intensif, dan *ministrare* yang artinya memenuhi atau melayani. Jadi *administrare* berarti melayani atau memenuhi dengan intensif. Kalau diambil kata dari bahasa Inggris jadi *administration* bila ditelaah lagi ke bahasa Indonesia menjadi "administrasi". Jauh sebelum adanya terjemahan dalam bahasa Inggris, bagi masyarakat Indonesia telah mengenal istilah "*administratie*" sebagai warisan jaman penjajahan Belanda yang bercokol di Indonesia kurang lebih tiga setengah abad atau kurang lebih 350 tahun lamanya.

Menurut Banga (2018:15) administrasi dalam arti sempit adalah keseluruhan aktivitas yang bersifat ketatausahaan, yaitu mencakup kegiatan suratmenyurat, mulai dari pencatatan atau agenda surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan pengarsipan surat, termasuk pencatatan dan pengolahan data berupa informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi. Administrasi secara luas menurut Simon dalam Pasolong (2016:6) didefinisikan sebagai berbagai aktivitas kelompok yang dilakukan dengan mencapai sebuah tujuan bersama yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Nawawi dalam Inu Kencana (2014:50), menjelaskan administrasi merupakan kegiatan-kegiatan proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditentukan.

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris "*public*" yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak, dan rakyat. Frederickson dalam Pasolong

(2016:54), menyatakan lima perspektif yang ada pada konsep “publik”, yaitu (1) publik sebagai wakil yang menaungi kepentingan seluruh dengan suara. (2) publik sebagai konsumen, pengertian konsumen tidak perlu terdiri atas berbagai individu yang tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, tetapi dalam jumlah yang cukup besar mereska menyebabkan penuntutan layanan birokrasi. Oleh sebab itu posisinya tersebut dianggap menjadi publik.(3) publik sebagai warga negara, yaitu partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga didalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dianggap penting. (4) publik sebagai pemilih rasional , berdasarkan individu masyarakat yang berhak memilih apa yang menjadi haknya. Dan (5) publik sebagai kelompok kepentingan yaitu lahirnya kepentingan publik hasil dari interaksi kelompok.

Syafi'ie dkk, dalam Pasolong (2016:7), mendefinisikan publik adalah sejumlah orang yang memiliki pola pikir dan perasaan yang sama, serta sikap atau harapan yang sama dan mempunyai perilaku yang terpuji sesuai nilai atau norma baik yang dimilikinya. Sedangkan definisi administrasi publik, menurut Henry dalam Pasolong (2016:17), menjelaskan sebagai suatu perpaduan antara teori dan praktik, yang menjadi perpaduan kompleks dalam rangka memahami hubungan pemerintah dengan rakyat yang diperintah, dan untuk mendorong berbagai kebijakan supaya bisa merespon berbagai kebutuhan sosial yang dibutuhkan. Adapun juga ruang lingkup administrasi publik yang dipaparkan oleh Henry dalam Pasolong (2016:19), yaitu organisasi publik, manajemen publik, dan implementasi kebijakan.

Gray didalam Pasolong (2016:18) mengatakan administrasi publik memiliki peranan dimasyarakat, antara lain (1) peran administrasi untuk menjamin pemerataan distribusi pendapatan Negara untuk golongan warga tidak mampu secara adil, (2) peran administrasi yaitu sebagai pelindung hak-hak masyarakat atas kepemilikan, dan adanya kebebasan rakyat atas diri mereka sendiri dibidang pendidikan, layanan kesehatan dan layanan lainnya yang bagian dari hak masyarakat.

Sedangkan yang dikatakan oleh Pasolong (2016) yang menyebutkan bahwa: “Administrasi merupakan suatu kegiatan yang tersusun secara teratur, yang melibatkan orang banyak dalam satu frekuensi (teamwork) untuk menggapai sasaran yang tepat waktu, tepat guna dan masuk akal.” Sementara itu, Administrasi Publik menurut Chalik & Surya (2016: 51) adalah: “Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana negara dikelola untuk melangsungkan kehidupan bernegara yang pengelola negara seperti yudikatif, legislatif dan juga eksekutif serta yang berurusan dengan publik yang meliputi manajemen publik dan kebijakan publik beserta dalam administrasi pembangunan serta juga etika bagaimana mengatur penyelenggaraan negara”.

Menurut Nigro dan Nigro dalam Maksudi & Irawan, (2017: 223-224) administrasi publik adalah:

1. Administrasi publik merupakan usaha kerjasama kelompok dalam suatu susunan atau lingkungan pemerintahan.
2. Administrasi publik mencakup ketiga cabang pemerintah berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan dari ketiga badan tersebut.

3. Administrasi publik mempunyai peranan penting di dalam perumusan kebijakan umum/negara dan oleh karena itu merupakan bagian dari proses politik.
4. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat (swasta).
5. Administrasi public mempunyai hubungan erat dengan berbagai elemen masyarakat baik perorangan maupun kelompo yang dimana diberikannya pelayanan kepada rakyat.

Menurut Anggara (2016) tugas seorang administrator adalah melaksanakan pekerjaan dengan proses pengorganisasian untuk rangka mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa Administrasi Publik adalah kegiatan yang dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan publik.

2. Ciri-Ciri Administrasi Publik

Ciri administrasi publik menurut Thoha dalam Banga (2018:85) merupakan salah satu hal penting yang perlu dipahami dalam studi ilmu administrasi negara/administrasi publik, karena dengan memahami ciri administrasi negara/administrasi publik, berarti memiliki kemampuan untuk menjelaskan konsep administrasi negara/administrasi publik secara komprehensif. Banyak penulis yang mengemukakan pandangannya tentang ciri administrasi negara/administrasi publik. Cirinya diantaranya :

- a. Pelayanan administrasi negara/administrasi publik lebih bersifat urgen dibandingkan pelayanan, misalnya: lalulintas, hankam, moneter, Politik Luar Negeri, agama dan sebagainya.
- b. Bersifat monopoli (misalnya: pos dan telegram, hankam, kehakiman), bersifat semi monopoli (pendidikan, kesehatan, perhubungan dan sebagainya).
- c. Pelayanan berdasarkan undang-undang dan peraturan (tidak fleksibel dibandingkan pelayanan swasta).
- d. Tidak ditentukan oleh mekanisme pasar (untung-rugi). tetapi ditentukan oleh kepentingan masyarakat dalam rangka public service/ pelayanan kepada masyarakat.
- e. Mengutamakan kepentingan orang banyak, adil tidak memihak proporsional dan bersih.

3. Unsur Pokok Administrasi Publik

Unsur-unsur pokok administrasi publik menurut Keban dalam Banga (2018:101) garis besar dapat dijelaskan melalui uraian berikut ini :

a. Manajemen Publik

Menurut Overman (1984), manajemen publik: dapat diartikan sebagai manajemen instansi pemerintah, gabungan dari fungsi manajemen (*planning, organizing, staffing, motivating, controlling, reporting, evaluating*) dan selanjutnya termasuk studi interdisipliner dari aspek umum organisasi.

b. Organisasi Publik

Organisasi publik merupakan lembaga pemerintah dikenal juga seperti birokrasi pemerintah. Istilah "birokrasi" ditunjukkan kepada instansi pemerintah karena pada mulanya birokrasi sebagai tipe ideal organisasi dari Max Weber, diterima dan diterapkan pada instansi pemerintah. Tipe ideal birokrasi menurut Max Weber adalah (1). Hirariki; (2). Promosi berdasarkan sistem merit dan keahlian; (3). Pengembangan karier; (4). Berpegang pada aturan dan ketentuan; (5). Hubungan bersifat resmi, tidak memandang siapa orangnya.

c. Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah komunikasi yang berlangsung dalam organisasi publik atau organisasi pemerintahan, dimana berlangsungnya proses kerja sama antara aparatur negara dalam bentuk penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, guna mewujudkan tujuan organisasi publik yaitu terciptanya layanan publik yang optimal. Oleh karena itu, komunikasi dalam hal ini dapat diartikan :

- 1) Proses menyampaikannya pesan ataupun berita dari pihak lain (komunikator) diteruskan ke pihak lainnya (komunikan) untuk suatu tujuan tertentu.
- 2) Komunikasi dapat berbentuk satu arah (*one way traffic*), dua arah (*two way traffic*), melalui komunikasi vertikal dan horizontal.
- 3) Komunikasi pemerintahan suatu komunikasi publik, karena bisa saja masyarakat mempunyai suatu keinginan untuk memberikan saran, keluhan,

kritikan, tuntutan, keinginan kepada administrator atau pejabat publik (komunikasi dari bawah ke atas):

- 4) Atau sebaliknya komunikasi dari administrator kepada masyarakat berupa peraturan dan ketentuan yang harus dipahami dan dilaksanakan publik (komunikasi dari atas ke bawah).

d. Informasi Pemerintahan

Informasi didefinisikan sebagai data yang berguna bagi sipenerima informasi tersebut. Informasi pemerintahan adalah data yang sudah diproses, diolah dan disaring yang berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat pemerintah atau pejabat birokrasi dalam rangka pengambilan keputusan. Sebagai pelayan publik, maka administrator atau pejabat birokrasi pemerintahan harus menjadi pencari informasi dari masyarakat, dan pemberi informasi bagi masyarakat dalam rangka pelayanan publik.

e. Kepegawaian

Kepegawaian Sebagai proses rekrutmen dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; dan juga Sumber suatu proses penatalaksanaan Sumber Daya Manusia organisasi agar memiliki kemampuan, kualitas, sekaligus kepuasan kerja dalam rangka pelayanan publik.

f. Perbekalan

Administrasi Perbekalan diartikan sebagai suatu aktivitas pencatatan, pengaturan pemakaian, penataan, pengadaan, pemeliharaan, serta penghapusan barang dalam suatu organisasi guna tercapainya efisiensi dan efektifitas pemanfaatan atau penggunaan perlengkapan organisasi.

g. Humas Pemerintahan

Humas pemerintahan merupakan unsur administrasi publik yang bertujuan menciptakan hubungan harmonis organisasi pemerintahan dengan pihak lainnya termasuk masyarakat. Pejabat humas berkewajiban menginformasikan jasa baik organisasi pemerintahan dalam setiap pemberian informasi kepada pihak lain secara transparan mengenai kegiatan yang telah dilakukan.

C. Kajian Administrasi Perpajakan

Menurut Mamesah dalam buku (Halim, 2015) mengatakan bahwa Keuangan Daerah ialah Kekayaan yang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu hak atau kewajiban yang dinilai dengan barang maupun uang yang dijadikan kekayaan daerah.

Pajak bermanfaat sebagai sumber penerimaan pendapatan Negara untuk digunakan membiayai berbagai keperluan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam menambah pendapatan di pajak ini, pemerintah harus semangat dalam mensosialisasikan terhadap rakyat untuk bisa ikut berpartisipasi dengan patuh dan taat membayar pajak. Cara lainya bisa dengan menyempurnakan peraturan perundang undangan perpajakan yang terbit sebelumnya dan dikenakan hukuman untuk membuat wajibnya patuh dan merasa diawasi secara ketat, sehingga membayar pajaknya.

1. Definisi Pajak

Menurut Anderson dalam Prasetyono (2018:13), pajak adalah iuran yang dipungut pemerintah dari masyarakat, tidak disebabkan oleh pelanggaran hukum, iuran tersebut bersifat memaksa sesuai ketentuan yang ditetapkan dahulu, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan bertujuan supaya pemerintah bisa melaksanakan tugasnya dalam mengatur segala urusannya.

2. Fungsi Pajak

fungsi pajak berdasarkan pendapat Waluyo (2016:6), terbagi menjadi dua fungsi yakni:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berguna untuk sumber dana diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran bagi pemerintah. Contohnya : pajak digunakan untuk pembangunan jalan raya.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak digunakan alat dalam mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dibuat, Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3. Jenis dan Penggolongan Pajak

Menurut Prasetyono (2018:15), pajak juga dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu.

a. Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan.

1) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak secara langsung dipikul atau dibayar oleh wajib pajak dan lagi pajak tersebut dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib pajak.

2) Pajak Tak Langsung

Pajak tak langsung merupakan proses pemungutan pajaknya tidak secara langsung dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak tetapi pajaknya ini dialihkan pembayarannya pada pihak ketiga. Selanjutnya pemungutan pajak itu pemerintah melihat wajib pajak sebagai perantara pemungut pajak. Jadi, yang benar-benar pihak yang membayar pajaknya yaitu pihak ketiga atau bisa juga disebut konsumennya

- b. Pembagian Pajak Berdasarkan Kewenangan Memungut Dalam hal ini, pajak dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak pungutannya dilakukan pemerintah pusat.

2) Pajak Daerah

Pajak pungutannya dilakukan pemerintah daerah.

Sistem Pemungutan Pajak dalam (Resmi, 2017), yaitu:

- a. *Official-Assessment System*, pemungutan yang besaran pajaknya ditentukan oleh fiskus yang memiliki wewenang untuk menentukannya.
- b. *Self-Assessment Sistem*, pemungutan yang mulai dari menghitung, melaporkan dan mempertanggungjawabkan besaran pajaknya dilakukan oleh wajib pajak.
- c. *Withholding System Sistem*, pemungutan yang melibatkan pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang harus di bayar.

Maka dari itu system pemungutan pajaknya berbeda tergantung bagaimana kebijakan yang dibuat dalam memungut pajak tersebut, bisa saja system pemungutannya diubah-ubah hal itu berguna untuk mendapatkan keuntungan dari ditetapkannya system pemungutan pajak yang berguna untuk suatu pembangunan dan juga digunakan untuk keperluan mensejahterakan masyarakat.

D. Pajak Daerah

Menurut Anderson dalam Prasetyono (2018:13), pajak adalah iuran yang dipungut pemerintah dari masyarakat, tidak disebabkan oleh pelanggaran hukum, iuran tersebut bersifat memaksa sesuai ketentuan yang ditetapkan dahulu, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan bertujuan agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam mengatur segala urusannya.

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut: Pajak provinsi, terdiri dari: 1).

Pajak bahan bakar bermotor; 2) pajak bea balik nama; 3) pajak kendaraan bermotor; 4) pajak rokok; 5) pajak air permukaan. Sedangkan pajak kota/kabupaten, terdiri atas: 1). pajak hotel; 2). pajak restoran; 3). pajak hiburan; 4). pajak reklame; 5). pajak penerangan jalan; 6). pajak mineral bukan logam dan batuan; 6). pajak parkir; 7). pajak air tanah; 8). pajak sarang burung walet; dan 9). pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

E. Pajak Reklame

Siahaan (2010; 386), menjelaskan pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame merupakan alat/benda, media dengan tujuan mempromosikan serta mendapatkan perhatian dari orang-orang yang melihatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah disebutkan bahwa: “Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut corak ragam dan bentuknya bertujuan untuk komersial mempromosikan, memperkenalkan, menganjurkan, serta menarik perhatian umum kepada suatu jasa, barang, atau orang yang bisa dilihat, dibaca, serta didengar dari tempat publik.”

Menurut Siahaan (2010; 386), dalam pajak reklame yang menjadi subjek Selain itu dalam pajak reklame, subjek pajaknya yaitu individu/badan menggunakan reklame sedangkan wajib pajaknya orang pribadi/badan yang mendirikan reklame yang menurut ketentuan yang berlaku dikenai pajak. Menurut Siahaan (2010:384) Objek pajak reklame merupakan semua penyelenggaraan

reklame. Penyelenggaraan bisa dilakukan oleh orang atau badan yang akan menyelenggarakan reklame. Objek pajak reklame meliputi berbagai reklame yang tercantum dalam peraturan yang ada.

F. Kajian Pengawasan

Pengawasan merupakan peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. (Sakti dan Fauzia 2018). Pengawasan didefinisikan oleh Handoko (2015:357), sebagai langkah menjamin tujuan dari organisasi agar tercapai. Sedangkan Manullang (2015), menjelaskan arti dari pengawasan sebagai rangkaian kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan, dinilai, dan dikoreksi kesalahan yang ada sehingga pekerjaan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam halnya pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Pengawasan didefinisikan oleh Handoko (2015:357), sebagai langkah menjamin tujuan dari organisasi agar tercapai. Sedangkan Manullang (2015), menjelaskan arti dari pengawasan sebagai rangkaian kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan, dinilai, dan dikoreksi kesalahan yang ada sehingga pekerjaan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Karakteristik pengawasan yang efektif sebagaimana dikemukakan Handoko (2015:370), yaitu:

- 1) Akurat .

Infomasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan

koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2) Tepat-Waktu.

Infomasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan dilakukan segera.

3) Obyektif dan menyeluruh.

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4) Terpusat pada titik pengawasan strategik.

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5) Realistik secara ekonomis.

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6) Realistik secara organisasional.

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8) Fleksibel.

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional.

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

10) Diterima para anggota organisasi.

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. (Handoko, 2015:370)

a. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan yang dikemukakan oleh Manullang (2015:176), diantaranya sebagai berikut ini:

1. Subjek Pengawasan

Dalam pengawasan, apabila dilihat dari yang melakukan pengawasan maka dapat dibedakan menjadi, (1) pengawasan eksternal, yakni jika seseorang yang melakukan pengawasan itu orang-orang diluar organisasi, Bisa disebut juga sebagai pengawasan informal, karena yang melakukan pengawasannya bukan dari orang dididalam organisasi. (2) pengawasan internal yakni orang yang melakukan pengawasan yang dilakukan oleh atasan/pimpinan dari organisasi tersebut. Pengawasan Bisa disebutkan pengawasan formal dikarenakan yang melakukan pengawasannya yaitu orang yang berwenang diadakannya pengawasan.

2. Objek Pengawasan

Melihat dari objek pengawasannya, dibedakan berdasarkan pada bidang tertentu diantaranya: (1) mengawasi manusia berdasarkan kegiatan yang dilakukannya, bertujuan apa kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengarahan dan tujuan-tujuan. (2) waktu, yakni melihat dari keadaan terselenggaranya pekerjaan yang dilakukan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. (3) produksi, yakni dilihat dari jumlah hasil produksi serta kualitas produk yang dihasilkan. (4) Keuangan, mengawasi keuangan apakah stabil atau tidak.

3. Cara Mengumpulkan Fakta-fakta Guna Pengawasan

Melakukan pengawasan harus melihat fakta yang ada, hal itu guna pengawasan yang dilakukan tidak salah sasaran. Fakta-Fakta yang dimaksud yaitu. Bisa berupa laporan lisan, pengamatan, dan laporan tertulis.

4. Waktu Pengawasan

Apabila melihat dari pengawasan yang dilakukan maka dapat dilihat dari, (1) pengawasan repressif, yakni, pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan. (2) pengawasan preventif, dimaksudkan pengawasannya sebelum adanya kesalahan yang dilakukan.

b. Cara-Cara Mengawasi

Menurut Manullang (2015: 178), agar pengawasan berjalan efektif, diperlukanlah kumpulan fakta-fakta yang diketahui oleh seorang pimpinan. Berikut ini dijelaskan cara untuk mengumpulkan faktanya, diantaranya:

1. Pengawasan Melalui Laporan Tertulis

Pengawasan dengan cara melihat laporan tertulis berguna sebagai laporan pertanggungjawaban yang dilakukan ketika pekerjaan sudah terlaksana dan dilaporkan kepada atasan. Pekerjaan dilakukan sesuai berdasarkan perintah dari atasan kepada bawahannya, yang diberikan tugas-tugas yang jadi tanggung jawabnya.

Adanya laporan tertulis, pemimpin bisa melihat kinerja bawahannya tersebut. Kelebihan adanya laporan tertulis, yakni dapat dilihat pihak-pihak yang membutuhkan laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada seseorang dan diambil manfaatnya untuk proses pengawasan serta evaluasi atas kegiatan yang sudah dijalankan.

2. Pengawasan Melalui Laporan kepada Hal-hal yang Bersifat Khusus

Pengawasan yang di tindak lanjuti atas dasar laporan yang diterima bersifat darurat atau perlu di tangani.

3. Peninjauan Pribadi

Pengawasan dengan melihat secara pribadi sehingga melihat apa saja yang sudah dikerjakan yang sudah dilaksanakan

4. Pengawasan Melalui Laporan Lisan

Pengawasannya melakukan dengan cara mengumpulkannya berbagai bukti-bukti melalui laporan lisan berasal dari informasi bawahannya. Melalui percakapan saja pemimpin dapat mendapatkan gambaran untuk informasi yang diinginkannya yang berasal dari orang yang memberikan informasi

terutama berasal dari bawahannya tentang informasi yang diperolehnya dari data yang ada.

c. Unsur Pengawasan

Proses pengawasan akan kurang optimal apabila tanpa adanya unsur pengawasan yang dikemukakan oleh Quible dalam Sukoco (2007:134), yaitu :

1. Identifikasi hasil yang diharapkan

Pengawasan yang tidak berjalan efektif disebabkan oleh identifikasi parameter yang belum jelas dari hasil pelaksanaan pekerjaan yang diinginkan. Maka diperlukan kolaborasi semua pihak termasuk pihak yang mengawasi dan diawasi. Bila perlu gunakanlah orang yang ahli untuk menentukan alat ukur pengawasan untuk melaksanakan proses pengawasannya.

2. Faktor-faktor yang diawasi

Pengawasan yang dilakukan tentu harus memahami hal apa saja yang perlu diawasi dengan melihat faktor-faktor yang diawasi. Individu yang berwenang untuk melakukan pengawasan tentu saja harus mengetahui faktor-faktor pengawasan guna pengawasan yang dilakukan tidak salah sasaran.

3. Aplikasi tindakan pembenahan.

Tindakan pembenahan sangat diperlukan untuk memperbaiki apabila hasil dari kinerja pengawasannya rendah, hal ini untuk meminimalisir adanya kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang yang terjadi.

4. Pengukuran kinerja

Segala aktivitas yang sudah dilakukan tentu harus ada penilaian yang ada, hal ini dilakukan guna memperbaiki dan mengevaluasi hal apa saja yang perlu dibenahi.

d. Pengawasan dalam pandangan Islam

Menurut Noer (2019:33) dilihat dari perspektif islam, suatu pengawasan bertujuan untuk mengkoreksi adanya kesalahan, meluruskan apabila di jalan yang salah selanjutnya membetulkan mana yang menjadi haknya.. Berikut contoh buktinya ada pengawasan yang dilakukan, terutama pengawasan dari Allah swt.

QS. Asy-Syura [26]: 6



فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَاتِهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Sungguh mereka telah mendustakan (al-Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.”

Adapun bentuk pengawasan didasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن

“Artinya: Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (Noer Rohmah didalam Jurnal Pendidikan Ilmiah Vol. 4 No. 2 (Desember) 2019).

Berdasarkan Al-qur’an dan hadist sudah dipaparkan, pengawasan yang berdasarkan Islam berguna untuk mengoreksi serta meluruskan yang tidak benar dan membenarkan mengenai hal yang dibolehkan. Pengawasan bisa dilakukan dengan pengawasan melalui dari diri sendiri yang didasarkan dari keimanan serta tauhid kepada Allah SWT. Orang-orang akan merasa terawasi setiap saat apabila orang tersebut mempunyai keimanan bahwa Allah selalu mengawasi hamba-Nya dan selanjutnya orang tersebut akan bertindak menjauhi segala larangannya. Selanjutnya berdasarkan atas keimanan dan juga ketaqwaan kepada allah, dimana dnegan hal demikian membuat merasa diri selalu terawasi akan perbuatan yang telah dilakukan.